



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD RIZAL ISMAIL
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 651661

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.070.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 237 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 666 m2/300 m2 di KAB / KOTA HALMAHERA BARAT, Rp. 370.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/101 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 47.950.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 231.543.599

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.519.493.599

III. HUTANG Rp. 2.622.140.368

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.897.353.231

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.